

STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN PENGANGKATAN CPNS LEBIH DARI 1 TAHUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - SK CPNS - Surat Tanda Tamat Pelatihan Latsar (STTPL) - Usulan Pengantar dari PPK - Formulir Usulan Penetapan Pengangkatan CPNS lebih dari 1 tahun, sesuai lampiran SE Kepala BKN nomor 10 tahun 2022
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B{Melakukan verifikasi dokumen oleh Tim Pemroses, jika sesuai di teruskan ke Pejabat Pamaraf, jika tidak sesuai di kembalikan (7 menit)} B -- Tidak --> C([Apabila BTS akan dikembalikan ke Instansi Pengusul untuk di perbaiki]) B -- Ya --> D[Memverifikasi dokumen dan memaraf oleh Pejabat Pamaraf (5 menit)] D <--> E[Menandatangani Persetujuan Rekomendasi oleh Pejabat TTD (15 menit)] E --> F([Menyerahkan Produk Layanan Oleh Pengadministrasi Kepegawaian ke Instansi Pengusul (15 menit)]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Perbaikan 42 menit /NIP
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Persetujuan Pengangkatan CPNS lebih dari 1 tahun
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626;</p> <p>b. WhatsApp Pengaduan: 082117551106;</p> <p>c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id</p> <p>d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : bkn6medan;</p> <p>2) Instagram : officialbknmedan;</p> <p>3) https://medan.bkn.go.id/aduan.</p>
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 3. Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002; 4. Peraturan Menteri PANRB nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS; 6. Peraturan BKN nomor 31 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN.